



Analysis of the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Tickets Traffic Directorate, Bengkulu Regional Police

Analisis Implementasi Tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu



Nur Arifin^a
Henny Aprianty^b
Rahiman Dani^c

Article history:

Submitted: 07-05-2026

Revised: 15-06-2026

Accepted: 25-06-2026

Keywords:

Policy Implementation, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Traffic Law Enforcement, Compliance, Bengkulu Regional Police Traffic Directorate.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Static Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at the Traffic Directorate of Bengkulu Regional Police. The study employed a descriptive qualitative approach using the policy implementation theory of Ripley and Franklin, which focuses on compliance, smooth implementation of routine functions, and the achievement of intended performance and impacts. The research informants consisted of personnel from the Traffic Directorate of Bengkulu Regional Police, officers from Bengkulu City Traffic Unit, and members of the public who had received ETLE traffic citations. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the implementation of Static ETLE at the Traffic Directorate of Bengkulu Regional Police has been relatively effective. In terms of compliance, all enforcement procedures have been carried out in accordance with applicable laws, regulations, and Standard Operating Procedures (SOPs). Regarding the smooth implementation of routine functions, the ETLE system has supported continuous traffic monitoring and law enforcement activities, although several challenges remain, including limited camera coverage, internet network disruptions, weather-related recording quality issues, and outdated vehicle ownership data. In terms of performance and intended impacts, ETLE has contributed positively to improving public traffic discipline, enhancing transparency and objectivity in law enforcement, and strengthening police professionalism. However, further improvements are required through infrastructure development, system enhancement, vehicle data updating, and more intensive public socialization programs to optimize

^a Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

^b Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

^c Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

ETLE implementation.

Keywords: *Policy Implementation, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Traffic Law Enforcement, Compliance, Bengkulu Regional Police Traffic Directorate.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis pada Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin yang meliputi aspek kepatuhan (compliance), kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Informan penelitian terdiri dari petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, anggota Satlantas Polresta Bengkulu, dan masyarakat yang pernah menerima tilang ETLE. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ETLE Statis pada Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu telah berjalan cukup efektif. Dari aspek kepatuhan, seluruh proses penindakan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Dari aspek kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, sistem ETLE mampu mendukung pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas secara berkelanjutan, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah kamera, gangguan jaringan internet, kualitas rekaman yang dipengaruhi kondisi cuaca, serta data kendaraan yang belum diperbarui. Dari aspek kinerja dan dampak yang dikehendaki, ETLE memberikan dampak positif terhadap peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, meningkatkan transparansi dan objektivitas penegakan hukum, serta mendukung profesionalisme aparat kepolisian. Namun demikian, diperlukan pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sistem, pembaruan data kendaraan, dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar pelaksanaan ETLE semakin optimal.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Penegakan Hukum Lalu Lintas, Kepatuhan, Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu.*

JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2026.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Nur Arifin*

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Bengkulu

Email address: nurarifin11@gmail.com

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan publik dan penegakan hukum. Transformasi digital yang terjadi saat ini mendorong instansi pemerintah untuk mengembangkan berbagai inovasi pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penerapan

sistem penegakan hukum berbasis elektronik pada sektor lalu lintas yang dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ini merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan Kepolisian Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Lalu lintas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terus terjadi setiap tahun juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan jalan raya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem pengawasan lalu lintas yang mampu menjangkau seluruh pengguna jalan secara efektif. Data yang menunjukkan tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia menjadi indikator bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas masih perlu ditingkatkan.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Kepolisian Republik Indonesia mengembangkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang memanfaatkan teknologi kamera elektronik untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini didukung oleh berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, serta berbagai peraturan internal Kepolisian yang mengatur mekanisme pelaksanaan ETLE. Kehadiran ETLE diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas melalui penggunaan teknologi informasi yang dapat menghasilkan bukti pelanggaran secara objektif dan akurat.

Penerapan ETLE tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran lalu lintas, tetapi juga menjadi instrumen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui sistem ini, proses penindakan dilakukan berdasarkan bukti elektronik yang terekam secara otomatis sehingga dapat meminimalkan praktik penyimpangan, mengurangi kontak langsung antara petugas dan pelanggar, serta meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, ETLE juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Di Provinsi Bengkulu, Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu mulai menerapkan sistem ETLE sejak tahun 2021 sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional Polri dalam bidang transformasi digital. Pelaksanaan ETLE dilakukan melalui mekanisme perekaman pelanggaran menggunakan kamera elektronik, verifikasi data kendaraan, identifikasi pemilik kendaraan melalui sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, hingga penerbitan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas serta memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga angka pelanggaran dapat ditekan.

Meskipun demikian, pelaksanaan ETLE di Bengkulu masih menghadapi berbagai tantangan. Data menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang tercatat pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan ETLE belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Selain itu, hasil pra penelitian menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang dinilai belum optimal karena masih didominasi oleh media massa dan media sosial. Di sisi lain, petugas juga menghadapi kendala dalam penyampaian surat konfirmasi kepada pelanggar akibat tingginya jumlah pelanggaran yang harus ditindaklanjuti.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek kepatuhan pelaksana, kelancaran pelaksanaan fungsi organisasi, serta kemampuan kebijakan dalam menghasilkan dampak yang diharapkan. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi ETLE menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan penting yang menentukan keberhasilan suatu program pemerintah. Sebuah kebijakan yang dirumuskan dengan baik tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi ETLE perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian mengenai implementasi ETLE di Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu menjadi semakin relevan karena sistem ini merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang sedang dikembangkan secara nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik berbasis

digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan ETLE di masa mendatang.

Berdasarkan hasil survei awal penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis di Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan petugas dalam penyampaian surat konfirmasi pelanggaran, serta masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa implementasi kebijakan ETLE belum berjalan secara maksimal sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis Implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu ditinjau dari aspek kepatuhan, kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki sebagaimana dikemukakan dalam model implementasi kebijakan Ripley dan Franklin.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada survei awal penelitian, Rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu ditinjau dari aspek kepatuhan, kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu berdasarkan dimensi kepatuhan, kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan ETLE sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik serta menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum lalu lintas.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah Deskriptif Kualitatif (Sugiyono, 2013). Informan dalam penelitian merupakan seorang individu tau pelaku yang benar-benar paham dan menguasai, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian (Jonathan Sarwono, 2006). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, dalam hal ini sampling digunakan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber (Koentjaraningrat, 2003). Informan penelitian diambil dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Informan penelitian ini sebanyak 10 orang, sebagai berikut:

- a. Informan Kunci
 - 1) Operator Tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Statis 1 orang.
 - 2) Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu 2 orang.
- b. Utama
Sat Lalu Lintas Polresta Kota Bengkulu 2 orang.
- c. Pokok
Masyarakat Kota Bengkulu yang pernah kena tilang ETLE sebanyak 5 orang.

Pengujian atau pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan triangulasi, sebagai berikut:

- a. Triangulasi Sumber
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member *check*) dengan tiga sumber data.
- b. Triangulasi Teknik
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar rancangan teori yang dibangun. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan wawancara dan observasi dan data sekunder

yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Castro et al., 2009).

Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu 3 bulan, terhitung mulai dari bulan Januari hingga Maret tahun 2026. Durasi waktu tersebut secara komprehensif dialokasikan untuk beberapa tahapan, meliputi tahap pra-penelitian dan perizinan, pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, pengumpulan data sekunder, proses triangulasi data, hingga tahap analisis dan penyusunan laporan akhir penelitian.

Secara operasional, prosedur analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan interaktif. Pertama, Reduksi Data, di mana peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan transkrip mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan Petugas Ditlantas Polda Bengkulu, Satlantas Polresta, dan masyarakat serta hasil observasi penerapan ETLE. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan. Kedua, Penyajian Data, yakni menyusun sekumpulan informasi yang telah direduksi tersebut ke dalam bentuk teks naratif yang sistematis agar peneliti lebih mudah memahami konteks implementasi ETLE berdasarkan aspek kepatuhan, rutinitas fungsi, serta kinerja dan dampak. Ketiga, Penarikan Kesimpulan, di mana peneliti melakukan tinjauan mendalam terhadap temuan lapangan, memaknainya, lalu membandingkannya dengan landasan teori Ripley dan Franklin untuk merumuskan kesimpulan akhir yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin yang meliputi aspek kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja serta dampak yang dikehendaki. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas pelaksana ETLE dan masyarakat yang pernah berhubungan dengan sistem ETLE.

a. Kepatuhan (Compliance)

Kepatuhan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksana kebijakan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Menurut teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin, kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan prosedural, tetapi sejauh mana dokumen kebijakan mampu menciptakan landasan operasional yang memadai bagi implementor. Temuan lapangan menunjukkan bahwa petugas Ditlantas Polda Bengkulu telah memiliki tingkat kepatuhan struktural yang tinggi, yang dibuktikan dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai payung hukum Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **BRIPTU Okto Ferry, S.M, Banit II Siegar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Bengkulu** selaku operator ETLE, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan ETLE selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Menurut beliau:

"Dalam pelaksanaan ETLE kami selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan lalu lintas maupun petunjuk teknis pelaksanaan ETLE. Setiap petugas wajib memahami aturan tersebut agar pelaksanaan ETLE berjalan sesuai ketentuan." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa petugas telah memiliki pemahaman mengenai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan ETLE sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki landasan hukum yang jelas.

Senada dengan hal tersebut, **BRIPTU Yongki Noviansyah, Ba Sat Lantas Polresta Bengkulu**, menjelaskan bahwa: *seluruh anggota yang terlibat dalam pelaksanaan ETLE diberikan pemahaman mengenai regulasi dan prosedur pelaksanaan sehingga dapat menjalankan tugas secara profesional.*

Selanjutnya, **AIPDA Yendra Hidayat, Banit I Siegar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Bengkulu** selaku operator ETLE, menyampaikan bahwa kepatuhan petugas terhadap SOP merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan ETLE. Menurut beliau:

"Baik, jadi untuk pelaksanaan ETLE ini SOP-nya kita sudah patuh, mulai dari validasi data pelanggaran, pengiriman surat konfirmasi, sampai batas waktu konfirmasi selama delapan hari semuanya dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan." Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ETLE telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Dari sisi masyarakat, **Bayu Rizki Ananda**, mahasiswa Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, menyatakan bahwa pelaksanaan ETLE yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya:

"Menurut saya pelaksanaan ETLE yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena prosesnya jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat."

Hal serupa juga disampaikan oleh **Tri Kurniawan**, seorang pengemudi ojek online yang mengatakan:

"Saya menilai pelaksanaan ETLE sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena seluruh proses penindakannya dilakukan berdasarkan bukti yang direkam oleh kamera."

Kemudian **Jemi Morsa**, seorang wiraswasta, menjelaskan bahwa sistem ETLE memberikan kepastian hukum karena pelanggaran yang ditindak memiliki bukti yang jelas. Sementara itu, **Hadi Saputra** dan **Syahrul** menyampaikan bahwa pelaksanaan ETLE dilakukan secara objektif dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan konfirmasi sebelum proses penindakan dilanjutkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa aspek kepatuhan dalam implementasi ETLE Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu telah berjalan dengan baik. Petugas melaksanakan tugas berdasarkan regulasi dan SOP yang berlaku, sementara masyarakat menilai bahwa pelaksanaan ETLE telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, secara kritis, kepatuhan aparat penegak hukum di tingkat internal ini belum berbanding lurus dengan kepatuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran (*target group*). Kepatuhan birokrasi dalam menerbitkan tilang secara mekanis justru memunculkan beban struktural baru ketika masyarakat tidak merespons surat konfirmasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan dalam kerangka ETLE tidak bisa hanya bersandar pada regulasi penindakan *top-down*, melainkan membutuhkan rekayasa struktural kepatuhan dari hulu, yaitu melalui edukasi hukum yang menyentuh kesadaran esensial pengendara, bukan sekadar ketakutan terhadap kamera pengintai.

b. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Indikator kedua yang diteliti adalah lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan ETLE dapat berjalan secara rutin sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Dalam perspektif Ripley dan Franklin, implementasi yang berhasil ditandai dengan kelancaran rutinitas fungsi organisasi pelaksana tanpa adanya kendala administratif yang membebani. Secara operasional, sistem ETLE dari perekaman otomatis hingga verifikasi di *Back Office* RTMC Polda Bengkulu telah berjalan sebagai fungsi rutin. Akan tetapi, analisis secara mendalam menemukan adanya disrupsi struktural pada integrasi basis data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **BRIPTU Okto Ferry, S.M.**, diketahui bahwa secara umum pelaksanaan ETLE di Kota Bengkulu berjalan cukup lancar. Beliau menyatakan:

"Secara umum pelaksanaan ETLE berjalan dengan cukup lancar. Sistem yang digunakan telah terintegrasi dengan database kendaraan bermotor sehingga memudahkan proses identifikasi pelanggaran." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem ETLE telah mampu mendukung pelaksanaan tugas pengawasan lalu lintas secara elektronik.

Selanjutnya, **BRIPTU Yongki Noviansyah** menjelaskan bahwa sejak awal pemasangan ETLE hingga saat ini fungsi sistem berjalan dengan baik dan mampu membantu pelaksanaan tugas kepolisian dalam pengawasan lalu lintas. Menurutnya:

"Kalau dari awal terpasangnya ETLE sampai saat sekarang Alhamdulillah fungsinya berjalan dengan baik dan sangat membantu tugas kepolisian."

Hal yang sama juga disampaikan oleh AIPDA Yendra Hidayat yang menjelaskan bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2022, sistem ETLE terus mengalami perkembangan dan telah berjalan dengan baik. Menurut beliau:

"Sejak launching ETLE pada tahun 2022 sampai sekarang pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif dalam penegakan hukum lalu lintas." Walaupun demikian, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi. Salah satu kendala yang disampaikan informan adalah masih adanya kendaraan yang belum melakukan balik nama sehingga surat konfirmasi pelanggaran terkadang dikirim kepada pemilik lama kendaraan.

Dari sisi masyarakat, **Bayu Rizki Ananda** menyatakan bahwa pelaksanaan ETLE cukup lancar karena kamera pengawas mampu merekam pelanggaran secara otomatis. **Tri Kurniawan** juga menilai bahwa ETLE memberikan perubahan yang signifikan dalam sistem penegakan hukum lalu lintas karena prosesnya menjadi lebih modern dan transparan. Namun demikian, **Jemi Morsa** mengaku bahwa dirinya baru mengetahui mengenai sistem ETLE setelah menerima surat panggilan dari kepolisian.

Menurutnya:

"Saya baru tahu aturan ETLE setelah menerima surat dari Polda, sehingga menurut saya sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan." Pendapat serupa juga disampaikan oleh Hadi Saputra dan Syahrul yang menilai bahwa sistem ETLE telah berjalan dengan baik, tetapi masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan rutinitas fungsi ETLE telah berjalan cukup lancar, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan kendala pemahaman masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian.

Hambatan utama lahir dari kelemahan sinkronisasi *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) dengan realitas kepemilikan kendaraan di masyarakat. Banyaknya kendaraan yang belum melakukan proses balik nama kepemilikan mengakibatkan surat konfirmasi pelanggaran tidak tepat sasaran. Selain itu, secara struktural kapasitas petugas ETLE di Kota Bengkulu mengalami kelebihan beban (overload) di mana petugas mengakui ketidakmampuan untuk menyampaikan seluruh surat pemberitahuan akibat volume pelanggaran yang sangat masif. Faktor struktural inilah yang menciptakan sumbatan (*bottleneck*) dalam administrasi birokrasi, sehingga fungsi penegakan hukum menjadi lambat dan menguras sumber daya secara tidak efisien.

c. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

Indikator terakhir dalam penelitian ini adalah terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki dari penerapan ETLE. Analisis teori Ripley dan Franklin memisahkan capaian implementasi ke dalam dua dimensi waktu: kinerja kebijakan (jangka pendek) dan dampak kebijakan (jangka panjang/manfaat). Ditinjau dari segi kinerja *surveillance* (pengawasan), ETLE terbukti sangat efektif dalam mendeteksi dan merekam ribuan pelanggaran. Namun, jika diukur dari instrumen "dampak yang dikehendaki" yakni terciptanya kedisiplinan dan penurunan angka pelanggaran, kebijakan ini justru menghadapi anomali struktural. Berdasarkan hasil wawancara dengan **BRIPTU Okto Ferry, S.M.**, diketahui bahwa ETLE telah berfungsi secara efektif sebagai sarana penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi.

Beliau menyatakan:

"ETLE telah berfungsi secara efektif sebagai sarana penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi dan membantu petugas dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan."

Menurut **BRIPTU Yongki Noviansyah**, ETLE sangat membantu tugas kepolisian karena pengawasan lalu lintas tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keberadaan petugas di lapangan. Selanjutnya, **AIPDA Yendra Hidayat** menjelaskan bahwa fungsi kamera ETLE telah berjalan dengan baik dan mampu merekam pelanggaran secara jelas.

Menurut beliau:

"Fungsi kamera sudah berjalan dengan baik, resolusinya cukup baik sehingga pelanggaran dapat terlihat dengan jelas."

Beliau juga menambahkan:

"Kami melihat adanya peningkatan kepatuhan masyarakat sejak ETLE diterapkan."

Dari sisi masyarakat, **Bayu Rizki Ananda** menyatakan bahwa ETLE telah berfungsi dengan baik sebagai sarana pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas. **Tri Kurniawan** mengungkapkan bahwa keberadaan ETLE membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berkendara. Sementara itu, **Jemi Morsa**, **Hadi Saputra**, dan **Syahrul** mengakui bahwa: *setelah mengetahui adanya pengawasan melalui ETLE mereka menjadi lebih disiplin dalam menggunakan helm, sabuk pengaman, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penerapan ETLE Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu telah menghasilkan dampak positif berupa meningkatnya efektivitas pengawasan lalu lintas, meningkatnya transparansi penegakan hukum, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih tertib dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa implementasi ETLE telah mampu mewujudkan kinerja dan dampak yang diharapkan dalam mendukung penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi di Kota Bengkulu.

Berdasarkan data laporan Polda Bengkulu, terungkap fakta krusial bahwa pelanggaran lalu lintas di Provinsi Bengkulu justru mengalami lonjakan drastis hingga 91%, yakni dari 28.843 pelanggaran pada tahun 2022 menjadi 55.289 pelanggaran pada tahun 2023. Kenaikan tajam ini menjadi bukti kritis bahwa efek jera (*deterrent effect*) dari penerapan ETLE belum terwujud secara fundamental. Secara struktural, kegagalan dalam mewujudkan dampak ini dipengaruhi oleh minimnya penetrasi sosialisasi yang selama ini hanya terbatas pada media massa dan media sosial secara satu arah, tanpa adanya pendampingan dan intervensi edukasi di ruang-ruang publik secara langsung.

Konsekuensinya, ETLE saat ini baru berfungsi sebagai mesin pencatat pelanggaran yang canggih, namun belum secara struktural mampu bertransformasi menjadi katalisator pengubah budaya berlalu lintas masyarakat.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait Implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu. Analisis hasil penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari tiga indikator utama, yaitu kepatuhan (compliance), lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi (smooth functioning of routine), serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (performance and impact).

Teori Ripley dan Franklin dipilih dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana suatu kebijakan publik dilaksanakan oleh organisasi pelaksana serta dampak yang dihasilkan terhadap kelompok sasaran kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu dianalisis untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku, kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi operasional ETLE, serta pencapaian tujuan kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

a. Implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu Ditinjau dari Aspek Kepatuhan (Compliance)

Kepatuhan (compliance) merupakan indikator pertama dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin. Menurut Ripley dan Franklin, implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila para pelaksana kebijakan mampu menjalankan tugas sesuai dengan aturan, prosedur, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pendapat tersebut didukung oleh Penelitian Ahmad yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata. (Sururi, 2017) Kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan ketaatan pelaksana terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut kemampuan organisasi dalam memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek kepatuhan dalam implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan BRIPTU Okto Ferry, S.M., AIPDA Yendra Hidayat, dan BRIPTU Yongki Noviansyah yang menjelaskan bahwa pelaksanaan ETLE dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Korlantas Polri. Setiap tahapan mulai dari perekaman pelanggaran, verifikasi data kendaraan, identifikasi pelanggar, hingga penerbitan surat konfirmasi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang baik terhadap substansi kebijakan yang diimplementasikan. Kepatuhan petugas terhadap SOP menjadi faktor penting dalam menjaga akurasi dan objektivitas penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mangge, Hartawan, dan Tawil yang menyatakan bahwa kepatuhan implementor terhadap prosedur operasional merupakan prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan ETLE. (Haris et al., 2024). Dalam konteks implementasi kebijakan, pemahaman terhadap aturan menjadi syarat utama agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Ketika pelaksana memahami dan menjalankan aturan dengan baik, maka potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diminimalkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan petugas tidak hanya terlihat dari aspek administratif, tetapi juga dari konsistensi dalam menjalankan prosedur operasional. AIPDA Yendra Hidayat menjelaskan bahwa setiap pelanggaran yang terekam kamera ETLE harus melalui proses validasi sebelum diterbitkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang ditindak benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan ETLE tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif teori Ripley dan Franklin, kondisi tersebut menunjukkan adanya tingkat compliance yang tinggi dari para implementor kebijakan. Kepatuhan pelaksana terhadap prosedur merupakan salah satu indikator utama keberhasilan implementasi karena mencerminkan kesesuaian antara desain kebijakan dengan praktik

pelaksanaannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan implementor, maka semakin besar peluang kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain kepatuhan petugas, penelitian ini juga menemukan adanya kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme ETLE. Hal ini terlihat dari pernyataan beberapa informan masyarakat seperti Bayu Rizki Ananda, Tri Kurniawan, Jemi Morsa, Hadi Saputra, dan Syahrul yang menyatakan bahwa sistem ETLE memberikan bukti pelanggaran yang jelas sehingga mereka menerima proses penindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Keberadaan bukti elektronik berupa foto dan video pelanggaran membuat masyarakat lebih mudah memahami alasan penindakan yang dilakukan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ETLE mampu meningkatkan legitimasi kebijakan penegakan hukum lalu lintas. Pada sistem tilang konvensional sering muncul persepsi bahwa penindakan dilakukan secara subjektif oleh petugas. Namun melalui ETLE, seluruh proses penindakan didasarkan pada bukti elektronik yang objektif sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum menjadi lebih tinggi.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat masyarakat yang baru memahami sistem ETLE setelah menerima surat konfirmasi pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai ETLE belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prosedur dan mekanisme ETLE.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek kepatuhan dalam implementasi ETLE Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu telah berjalan dengan baik. Petugas melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi dan SOP yang berlaku, sedangkan masyarakat mulai menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan lalu lintas. Namun demikian, peningkatan sosialisasi masih diperlukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem ETLE sehingga kepatuhan yang terbentuk tidak hanya bersifat represif, tetapi juga didasarkan pada kesadaran hukum.

b. Implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu Ditinjau dari Aspek Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi (Smooth Functioning of Routine)

Indikator kedua dalam teori Ripley dan Franklin adalah lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana organisasi pelaksana mampu menjalankan fungsi-fungsi kebijakan secara rutin tanpa mengalami hambatan yang berarti. Implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila aktivitas organisasi dapat berlangsung secara berkesinambungan dan mampu menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan ETLE Statis di Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu secara umum telah berjalan dengan cukup lancar. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan BRIPTU Okto Ferry, S.M., yang menjelaskan bahwa sistem ETLE telah terintegrasi dengan database kendaraan bermotor sehingga proses identifikasi pelanggaran dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Integrasi sistem tersebut memungkinkan petugas untuk memperoleh informasi kendaraan secara otomatis setelah pelanggaran terdeteksi oleh kamera ETLE.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas organisasi. Sebelum penerapan ETLE, pengawasan lalu lintas sangat bergantung pada keberadaan petugas di lapangan. Namun setelah diterapkannya ETLE, proses pengawasan dapat dilakukan selama dua puluh empat jam secara terus menerus melalui kamera pengawas yang dipasang pada titik-titik strategis.

BRIPTU Yongki Noviansyah juga menjelaskan bahwa sejak awal pemasangan ETLE hingga saat ini fungsi sistem berjalan dengan baik dan mampu mendukung tugas kepolisian dalam melakukan pengawasan lalu lintas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ETLE telah menjadi bagian dari rutinitas kerja organisasi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum lalu lintas.

Menurut teori Ripley dan Franklin, keberhasilan implementasi kebijakan ditandai dengan kemampuan organisasi dalam menjalankan rutinitas kerja secara stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan sistem ETLE yang mampu beroperasi secara terus menerus menunjukkan bahwa fungsi organisasi telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan ETLE. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah masih adanya kendaraan yang belum melakukan proses balik nama kepemilikan kendaraan. Akibatnya, surat konfirmasi pelanggaran sering dikirim kepada pemilik lama kendaraan sehingga proses konfirmasi menjadi kurang efektif.

Masalah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ETLE tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas data administrasi kendaraan bermotor. Temuan ini mendukung hasil penelitian Gunawan dan Intan yang menyebutkan bahwa keberhasilan operasional ETLE sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi yang digunakan. (Gunawan et al., 2026) Ketidakakuratan data kendaraan dapat menghambat proses penegakan hukum karena identitas pelanggar tidak selalu sesuai dengan data yang terdapat dalam sistem.

Selain itu, beberapa informan masyarakat menyatakan bahwa mereka belum memahami mekanisme ETLE secara menyeluruh. Jemi Morsa mengaku baru mengetahui sistem ETLE setelah menerima surat panggilan dari kepolisian. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai implementation gap atau kesenjangan implementasi. Kesenjangan implementasi terjadi ketika terdapat perbedaan antara tujuan kebijakan yang direncanakan dengan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaannya. Meskipun sistem ETLE telah berjalan dengan baik, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kualitas data dan tingkat pemahaman masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi ETLE tidak mengalami hambatan yang bersifat mendasar. Seluruh tahapan mulai dari perekaman pelanggaran, verifikasi data, penerbitan surat konfirmasi, hingga penyelesaian pelanggaran tetap dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi pelaksana memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan kebijakan ETLE.

Dengan demikian, berdasarkan teori Ripley dan Franklin, implementasi ETLE Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu telah memenuhi indikator lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan teknis dan administratif, secara umum fungsi organisasi berjalan dengan baik dan mampu mendukung tercapainya tujuan kebijakan.

c. Implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu Ditinjau dari Aspek Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki (Performance and Impact)

Indikator ketiga dalam teori Ripley dan Franklin adalah terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan mampu menghasilkan perubahan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja berkaitan dengan pencapaian target operasional kebijakan, sedangkan dampak berkaitan dengan perubahan perilaku atau kondisi yang terjadi pada kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan ETLE Statis di Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu telah menghasilkan berbagai kinerja dan dampak positif. Dari sisi organisasi, ETLE mampu meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas karena sistem bekerja secara otomatis selama dua puluh empat jam tanpa bergantung pada jumlah petugas yang tersedia di lapangan.

Hasil wawancara dengan BRIPTU Okto Ferry, S.M. menunjukkan bahwa ETLE telah berfungsi secara efektif sebagai sarana penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi. Sistem ini membantu petugas dalam mendeteksi pelanggaran, mengidentifikasi kendaraan, dan melakukan penindakan secara lebih cepat dan akurat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan operasional kebijakan telah tercapai. Salah satu tujuan utama ETLE adalah meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya sistem elektronik, proses pengawasan menjadi lebih efisien dan mampu menjangkau wilayah yang lebih luas dibandingkan pengawasan konvensional.

Selain meningkatkan efektivitas pengawasan, ETLE juga berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Seluruh pelanggaran yang ditindak memiliki bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini mengurangi potensi terjadinya praktik penyimpangan dan meningkatkan profesionalisme petugas dalam menjalankan tugas. Dalam perspektif administrasi publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan ETLE dalam menciptakan proses penegakan hukum yang lebih transparan dapat dianggap sebagai salah satu dampak positif dari implementasi kebijakan.

Dari sisi masyarakat, penelitian menunjukkan bahwa ETLE memberikan dampak berupa meningkatnya kesadaran dan disiplin berlalu lintas. AIPDA Yendra Hidayat menjelaskan bahwa sejak diterapkannya ETLE terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berkendara karena mengetahui bahwa pelanggaran dapat direkam secara otomatis oleh kamera ETLE.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa informan masyarakat yang mengaku menjadi lebih disiplin setelah mengetahui keberadaan ETLE. Mereka lebih konsisten menggunakan helm, sabuk

pengaman, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena tidak ingin terkena sanksi tilang elektronik. Perubahan perilaku tersebut menunjukkan bahwa ETLE telah menghasilkan efek jera (*deterrent effect*) yang menjadi salah satu tujuan utama kebijakan penegakan hukum lalu lintas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Vionita dan Julianti yang menemukan bahwa ETLE mampu meningkatkan kepatuhan pengguna jalan melalui pengawasan berbasis teknologi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pelanggaran lalu lintas yang terjadi serta masih ditemukan masyarakat yang belum memahami mekanisme ETLE secara menyeluruh. Temuan ini juga ditemukan dalam penelitian Adhithia, Nurdin, dan Rajab mengenai tantangan implementasi ETLE di Indonesia. (Adhithia et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat masih berlangsung secara bertahap dan memerlukan dukungan melalui kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan jumlah kamera ETLE juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Pengawasan belum dapat menjangkau seluruh ruas jalan sehingga masih terdapat peluang bagi pelanggaran lalu lintas untuk terjadi di lokasi yang belum terpasang kamera ETLE. Walaupun demikian, secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ETLE telah mampu menghasilkan kinerja dan dampak yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Sistem ETLE berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat transparansi penegakan hukum, meningkatkan disiplin masyarakat, serta mendukung transformasi digital pelayanan publik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. (Lestari et al., 2026)

Berdasarkan ketiga indikator yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin, yaitu kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja serta dampak yang dikehendaki, dapat disimpulkan bahwa implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu telah berjalan dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, kebijakan ini telah mampu mencapai tujuan utamanya sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin, dapat disimpulkan bahwa implementasi ETLE Statis secara umum telah berjalan dengan baik. Pada aspek kepatuhan (*compliance*), petugas pelaksana telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Proses verifikasi pelanggaran, identifikasi kendaraan, hingga penerbitan surat konfirmasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan. Pada aspek lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi (*smooth functioning of routine*), sistem ETLE telah mampu mendukung pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas secara elektronik. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat, gangguan teknis jaringan, serta data kepemilikan kendaraan yang belum diperbarui melalui proses balik nama kendaraan. Pada aspek terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*performance and impact*), penerapan ETLE telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya efektivitas pengawasan lalu lintas, transparansi penegakan hukum, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih tertib dalam berlalu lintas. Dengan demikian, implementasi ETLE Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu telah menunjukkan keberhasilan dalam mendukung modernisasi penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi.

Saran:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Statis Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu. Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme, prosedur, serta manfaat penerapan ETLE melalui berbagai media informasi, baik media sosial, media elektronik, media cetak, maupun kegiatan tatap muka. Upaya tersebut penting dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sistem tilang elektronik sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Selain itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu perlu terus melakukan pengembangan dan peningkatan sarana serta prasarana pendukung ETLE, termasuk penambahan

jumlah kamera pengawas pada titik-titik rawan pelanggaran lalu lintas dan peningkatan kualitas jaringan pendukung sistem. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pelaksanaan ETLE dapat berjalan lebih optimal dan mampu menjangkau wilayah pengawasan yang lebih luas. Selanjutnya, perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antara pihak kepolisian dengan instansi terkait dalam mendorong masyarakat untuk melakukan pembaruan data kendaraan bermotor dan proses balik nama kendaraan. Langkah ini penting untuk meminimalkan kendala dalam proses identifikasi pelanggar serta penyampaian surat konfirmasi pelanggaran. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai implementasi ETLE diharapkan dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan teori, metode, atau lokasi penelitian yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan publik berbasis teknologi serta memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

5 Daftar Pustaka

- Adhitia, S., Nurdin, N., & Rajab, R. (2025). Tantangan Implementasi Kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia Kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mengurangi interaksi anggota polisi di jalan raya dengan pengemudi dengan cara meng. *Journal Of Public Policy and Applied Administration*, 7(1), 27–56.
- Castro, Barros, P., Miles, S. Caronm. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UI Press.
- Gunawan, I. Z., Hambali, A. R., & Buana, A. P. (2026). *Jurnal Legal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026 ETLE di Maros : Efektifkah Menekan Pelanggaran Lalu Lintas ? Jurnal Legal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026*. I(2).
- Haris, A., Mangge, A., Tadulako, U., & Palu, K. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA PALU Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik , juga dikenal sebagai Electronic Traffic Samratulangi Kecamatan Palu Timur (Depan Kantor Gubernur), kemudian Jl Gajah*. 2(3), 496–508.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*. Graha Ilmu.
- Koentjaraningrat. (2003). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Gramedia.
- Lestari, D., Sihalohe, U. O., & Puspita, D. P. (2026). *Improving Digital Governance through Electronic Traffic Law Enforcement in Makassar , Indonesia*. 8(1), 60–78.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. (p. 118).
- Sururi, A. (2017). Innovation of Policy in Public Administration Perspective toward the realization of Good Public Policy Governance. *Spirit Publik*, 12, 14–31.

